



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan pelaksanaan dan besarnya biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu diadakan penyesuaian.
 - b. bahwa penyesuaian ketentuan pelaksanaan dan besarnya biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 37);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

- 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17)
- 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD serta Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
5. Pegawai Negeri yang disebut juga Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugasnegera lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersipat teknis professional yaitu Dokter dan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
7. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD serta Kepala Satuan Kerja.
8. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
9. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
10. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pejabat/Pegawai Negeri serta Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas dinas.
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.

BAB II PERJALANAN DINAS Pasal 2

- (1) Pejabat yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara/Daerah yang telah diangkat dan digaji menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah pegawai yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan digaji menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Dokter dan Bidan PTT.
- (4) Perjalanan Dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan Negara dan Daerah.

- (5) Pegawai / Pejabat yang melakukan perjalanan Dinas selama berada diluar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak / fasilitas dalam jabatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setiap pengeluaran untuk biaya perjalanan dinas yang akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur sehemat mungkin.

Pasal 3

Pejabat/Pegawai Negeri dan PTT yang melaksanakan Perjalanan Dinas di golongan sebagai berikut :

- Tingkat A Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a ke atas, Bupati/Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Tingkat B Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a sampai dengan III/d dan Dokter PTT.
- Tingkat C Pegawai Golongan II/a sampai dengan II/d dan Bidan PTT.
- Tingkat D Pegawai Golongan I/a sampai dengan I/d.

Pasal 4

- (1) Pejabat/Pegawai Negeri yang melaksanakan Perjalanan Dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah sebagaiberikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati.
 - c. Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan ditandatangani oleh Bupati.
 - d. Camat dan Kepala Unit Kerja di Kecamatan ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Ketua,Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD.

Pasal 5

- (1) Apabila karena sesuatu hal Bupati berhalangan, maka untuk pelaksanaan kewenangan penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dapat ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Apabila karena sesuatu hal Ketua DPRD berhalangan, maka untuk pelaksanaan kewenangan penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dapat ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 6

- (1) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah Kabupaten kewenangan penanda tanganan SPT adalah Bupati.

- (2) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas kedalam daerah kewenangan menandatangani SPT dapat dilaksanakan oleh Pimpinan Satker atau Kepala Unit Kerja.

Pasal 7

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Kerja yang mendanai perjalanan dinas tersebut.

Pasal 8

Apabila Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas Golongannya lebih rendah dari yang diperintah maka Surat Perintah Perjalanan Dinasnya harus ditandatangani oleh Pejabat yang lebih tinggi golongannya.

Pasal 9

- (1) Pejabat/Pegawai Negeri yang melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan maksimum selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Perpanjangan waktu Perjalanan Dinas Sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) tersebut diatas, dapat diberikan oleh Sekretaris daerah kabupaten atas nama Bupati dalam hal mana Pegawai / Pejabat yang bersangkutan cukup memberikan bukti/alasan tertulis bahwa tidak cukupnya waktu disebabkan karena urusan belum selesai.
- (3) Pengecualian batas waktu lamanya perjalanan dinas sebagaimana ayat (1) pasal ini diperuntukan bagi Pejabat/Pegawai Negeri pada Badan/Dinas/Satuan Kerja lainnya yang karena tugas pokok dan fungsinya harus melaksanakan perjalanan dinas melebihi batas waktu tersebut sesuai dengan program.

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri dan PTT yang memegang kendaraan dinas roda empat yang melaksanakan perjalanan dinas dalam wilayah Propinsi Lampung diharuskan menggunakan kendaraan dinas.
- (2) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri yang melaksanakan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan tidak diberikan tambahan BBM.
- (3) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri dan PTT yang melaksanakan Perjalanan Dinas keluar daerah Kabupaten Lampung Selatan menggunakan kendaraan dinas roda empat diberikan tambahan BBM sesuai dengan jarak yang ditempuh dengan perbandingan setiap 8 KM ditambah satu liter.
- (4) Pejabat/Pegawai Negeri dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Propinsi Lampung selain diberikan tambahan BBM bagi yang membawa kendaraan dinas roda 4 (empat) diberikan Uang Harian, Fasilitas Penginapan, Biaya Penyeberangan Kapal dan biaya TOL apabila menggunakan fasilitas itu.

- (5) Bagi Pegawai / Pejabat daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas karena sesuatu hal harus melakukan Pencarteran motor Tempel atau Speed boat dan ojek dapat diberikan biaya tambahan.

Pasal 11

- (1) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan dalam wilayah Propinsi Lampung hanya diberikan Uang Harian.
- (2) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas kurang dari 6 jam hanya diberikan 60 % dari Uang Harian.

Pasal 12

- (1) Pengguna Pesawat Udara hanya dapat diberikan kepada Pejabat/Pegawai Negeri Golongan III/a ke atas dan Dokter PTT.
- (2) Penggunaan Pesawat Udara untuk Pangkat / Golongan II dan I dan Bidan PTT atas izin tertulis Bupati Lampung Selatan.
- (3) Jumlah Tim atau rombongan / Pengikut yang melaksanakan Perjalanan Dinas Perlu dibatasi seminimal mungkin dalam rangka pencapaian Efisiensi biaya / penghematan Pengeluaran Keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Sebelum Pejabat/Pegawai dan PTT yang melakukan Perjalanan Dinas berangkat harus melaporkan diri kepada atasannya /Satuan Kerja/Unit Kerja.
- (2) Apabila Pegawai / Pejabat daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas telah kembali ke tempat, diharuskan melaporkan diri kepada atasannya.
- (3) Para Pejabat Daerah yang diberikan kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas, bertanggungjawab dan wajib mengamati agar supaya dalam lingkungannya tidak terjadi Perjalanan Dinas yang tidak perlu.
- (4) Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali kecuali tugas pengawasan selambat-lambatnya 14 hari diharuskan memberikan laporan kepada Bupati / Ketua / Kepala Dinas / Kepala badan / Kepala Kantor / Pejabat pelaksana teknis kegiatan.
- (5) Kepada Pegawai / Pejabat daerah Kabupaten yang telah kembali dari Perjalanan Dinas diharuskan menyelesaikan pertanggungjawaban Keuangan yang dipergunakan pada Perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (6) Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing Unit instansi yang dituju, sebagai salah satu syarat keabsyahan Pertanggungjawaban Keuangan.
- (7) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja berkenaan.

Pasal 14

- (1) Setelah surat Perintah Perjalanan dinas ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas harus dibuat rincian biaya Perjalanan Dinas / Daftar ongkos Perjalanan (DOP) yang disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD)
- (2) Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat/pegawai negeri yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang diterimanya.

Pasal 15

Besarnya dan perincian biaya pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda

pada tanggal 12 September 2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda

pada tanggal 12 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

→
Drs. Hi. RUSDI MALIKI.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 089

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

Nomor : 16 Tahun 2007
Tanggal : 12 September 2007

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	UANG HARIAN TINGKAT A	UANG HARIAN TINGKAT B	UANG HARIAN TINGKAT C	UANG HARIAN TINGKAT D
1	2	3	4	5	6
1	NANGROE ACEH DARUSALAM	300,000	260,000	220,000	180,000
2	SUMATERA UTARA	300,000	260,000	220,000	180,000
3	RIAU	300,000	260,000	220,000	180,000
4	KEPULAUAN RIAU	300,000	260,000	220,000	180,000
5	JAMBI	300,000	260,000	220,000	180,000
6	SUMATERA BARAT	300,000	260,000	220,000	180,000
7	SUMATERA SELATAN	300,000	260,000	220,000	180,000
8	BENGKULU	300,000	260,000	220,000	180,000
9	BANGKA BELITUNG	300,000	260,000	220,000	180,000
10	BANTEN	300,000	260,000	220,000	180,000
11	JAWA BARAT	350,000	300,000	250,000	210,000
12	D.K.I. JAKARTA	450,000	400,000	350,000	300,000
13	JAWA TENGAH	300,000	260,000	220,000	180,000
14	D.I. YOGYAKARTA	350,000	300,000	250,000	210,000
15	JAWA TIMUR	350,000	300,000	250,000	210,000
16	BALI	400,000	350,000	300,000	250,000
17	NUSA TENGGARA BARAT	350,000	300,000	250,000	210,000
18	BUSA TENGGARA TIMUR	350,000	300,000	250,000	210,000
19	KALIMANTAN BARAT	300,000	260,000	220,000	180,000
20	KALIMANTAN TENGAH	300,000	260,000	220,000	180,000
21	KALIMANTAN SELATAN	300,000	260,000	220,000	180,000
22	KALIMANTAN TIMUR	350,000	300,000	250,000	210,000
23	SULAWESI UTARA	300,000	260,000	220,000	180,000
24	GORONTALO	300,000	260,000	220,000	180,000
25	SULAWESI BARAT	300,000	260,000	220,000	180,000
26	SULAWESI SELATAN	350,000	300,000	250,000	210,000
27	SULAWESI TENGAH	300,000	260,000	220,000	180,000
28	SULAWESI TENGGARA	300,000	260,000	220,000	180,000
29	MALUKU	300,000	260,000	220,000	180,000
30	MALUKU UTARA	300,000	260,000	220,000	180,000
31	PAPUA	450,000	400,000	350,000	300,000
32	IRIAN JAYA BARAT	400,000	350,000	300,000	250,000
33	BANDAR LAMPUNG	260,000	220,000	180,000	140,000
34	TANGGAMUS	260,000	220,000	180,000	140,000
35	METRO	260,000	220,000	180,000	140,000
36	LAMPUNG TENGAH	260,000	220,000	180,000	140,000
37	LAMPUNG TIMUR	260,000	220,000	180,000	140,000
38	LAMPUNG UTARA	260,000	220,000	180,000	140,000
39	TULANG BAWANG	260,000	220,000	180,000	140,000
40	WAY KANAN	260,000	220,000	180,000	140,000
41	LAMPUNG BARAT	260,000	220,000	180,000	140,000

- Catatan 1. Uang harian digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal dan uang makan, bersifat Lumpsum bagi perjalanan dinas keluar Daerah Propinsi Lampung
2. Perjalanan dinas keluar daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Propinsi Lampung, uang harian tersebut sudah termasuk transport PP

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Yi. ZULKIFLI ANWAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

Nomor : 18 Tahun 2007
Tanggal : 12 September 2007

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No.	KECAMATAN	UANG HARIAN TINGKAT A	UANG HARIAN TINGKAT B	UANG HARIAN TINGKAT C	UANG HARIAN TINGKAT D
1	2	3	4	5	6
1	KALIANDA	260,000	220,000	180,000	140,000
2	RAJABASA	260,000	220,000	180,000	140,000
3	PENENGAHAN	260,000	220,000	180,000	140,000
4	PALAS	260,000	220,000	180,000	140,000
5	SRAGI	260,000	220,000	180,000	140,000
6	KETAPANG	260,000	220,000	180,000	140,000
7	BAKAUHENI	260,000	220,000	180,000	140,000
8	SIDOMULYO	260,000	220,000	180,000	140,000
9	CANDIPURO	260,000	220,000	180,000	140,000
10	WAY PANJI	260,000	220,000	180,000	140,000
11	KATIBUNG	260,000	220,000	180,000	140,000
12	WAY KALAM	260,000	220,000	180,000	140,000
13	MERBAU MATARAM	260,000	220,000	180,000	140,000
14	TANJUNG SARI	260,000	220,000	180,000	140,000
15	TANJUNG BINTANG	260,000	220,000	180,000	140,000
16	JATI AGUNG	260,000	220,000	180,000	140,000
17	NATAR	260,000	220,000	180,000	140,000
18	TEGINENENG	260,000	220,000	180,000	140,000
19	NEGERI KATON	260,000	220,000	180,000	140,000
20	GEDONG TATAAN	260,000	220,000	180,000	140,000
21	KEDONDONG	260,000	220,000	180,000	140,000
22	WAY LIMA	260,000	220,000	180,000	140,000
23	PADANG CERMIN	260,000	220,000	180,000	140,000
24	PUNDUH PIDADA	260,000	220,000	180,000	140,000
25	Kec ke Desa, Desa ke Kecamatan Desa ke Desa dalam Kecamatan	60,000	50,000	40,000	30,000

**BESAR BANTUAN TRANSPORT PENYEBERANGAN ANTAR PULAU
DALAM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO.	URAIAN	JUMLAH BANTUAN
1.	Penyeberangan antar Pulau dalam Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Jumlah Peserta 1 - 10 Pegawai, Bantuan Transport Penyeberangan per Tim	Rp. 350.000
2.	Penyeberangan antar Pulau dalam Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Jumlah Peserta 11 - 20 Pegawai, Bantuan Transport Penyeberangan per Tim	Rp. 700.000

- Catatan
1. Uang harian digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal / PP dan uang makan bersifat Lumpsum
 2. Bagi Pejabat, Pegawai Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan Perjalanan Dinas tujuan ke desa - desa hanya diberikan uang harian sampai ke ibukota Kecamatan
 3. Perjalanan Dinas Kecamatan ke Desa, Desa ke Kecamatan dan Desa ke Desa dibayar perhari kerja (bukan perjumlah Desa yang dikunjungi)

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

Nomor : 18 Tahun 2007
Tanggal : 12 September 2007

BANTUAN BBM BAGI PEGAWAI/PEJABAT DAERAH YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS DAN BIAYA TRANSPOT PULANG PERGI BAGI PEGAWAI/PEJABAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN UMUM DALAM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No.	KECAMATAN	Jarak Tujuan (PP) (KM)	Bantuan BBM Mobil Dinas	Biaya Bantuan Transpot (Pulang-Pergi)
1	2	3	4	8
1	KALIANDA	10	2	Rp. 10,000
2	RAJABASA	30	5	Rp. 15,000
3	PENENGAHAN	40	6	Rp. 20,000
4	PALAS	50	7	Rp. 30,000
5	SRAGI	60	9	Rp. 40,000
6	KETAPANG	60	9	Rp. 40,000
7	BAKAUHENI	70	10	Rp. 30,000
8	SIDOMULYO	40	6	Rp. 30,000
9	CANDIPURO	60	9	Rp. 40,000
10	WAY PANJI	30	5	Rp. 40,000
11	KATIBUNG	70	10	Rp. 40,000
12	WAY KALAM	80	12	Rp. 50,000
13	MERBAU MATARAM	120	17	Rp. 50,000
14	TANJUNG SARI	130	19	Rp. 40,000
15	TANJUNG BINTANG	140	20	Rp. 40,000
16	JATI AGUNG	140	20	Rp. 40,000
17	NATAR	150	22	Rp. 40,000
18	TEGINENENG	160	23	Rp. 50,000
19	NEGERI KATON	170	25	Rp. 60,000
20	GEDONG TATAAN	160	23	Rp. 50,000
21	KEDONDONG	200	29	Rp. 60,000
22	WAY LIMA	170	25	Rp. 60,000
23	PADANG CERMIN	200	29	Rp. 70,000
24	PUNDUH PIDADA	260	23	Rp. 80,000
25	KEC-DESA, DESA-KECAMATAN	00	-	-

- Catatan : 1. Bagi Pegawai dan Pejabat Daerah Perjalanan Dinas tujuan ke desa hanya diberikan uang BBM sampai ibukota Kecamatan.
2. Biaya transpot dibayarkan per orang untuk biaya perjalanan pergi ke tujuan dan pulang dari tujuan.
3. Desa ke Desa-desa, Desa ke Kecamatan tidak diberikan BBM dan Transport
4. Apabila jarak tempuh tersebut 10 Km maka diberikan bantuan BBM 2 liter

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Wt. ZULKIFLI ANWAR

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

No.	PROVINSI / KABUPATEN	TARIF RATA-RATA HOTEL			
		Bintang IV	Bintang III	Bintang II	Bintang I
1	2	3	4	5	6
1	NANGROE ACEH DARUSALAM	500,000	350,000	250,000	200,000
2	SUMATERA UTARA	550,000	400,000	300,000	200,000
3	RIAU	550,000	400,000	300,000	200,000
4	KEPULAUAN RIAU	450,000	350,000	200,000	150,000
5	JAMBI	500,000	300,000	200,000	150,000
6	SUMATERA BARAT	600,000	400,000	300,000	250,000
7	SUMATERA SELATAN	500,000	350,000	250,000	200,000
8	BENGKULU	400,000	350,000	300,000	200,000
9	BANGKA BELITUNG	400,000	350,000	250,000	150,000
10	BANTEN	500,000	400,000	300,000	200,000
11	JAWA BARAT	600,000	450,000	350,000	250,000
12	DKI JAKARTA	700,000	550,000	400,000	300,000
13	JAWA TENGAH	600,000	450,000	350,000	250,000
14	DI YOGYAKARTA	550,000	400,000	300,000	200,000
15	JAWA TIMUR	600,000	450,000	350,000	250,000
16	BALI	1,100,000	850,000	700,000	450,000
17	NUSA TENGGARA BARAT	600,000	450,000	300,000	200,000
18	BUSA TENGGARA TIMUR	500,000	350,000	250,000	200,000
19	KALIMANTAN BARAT	500,000	350,000	250,000	200,000
20	KALIMANTAN TENGAH	500,000	350,000	250,000	200,000
21	KALIMANTAN SELATAN	500,000	400,000	250,000	150,000
22	KALIMANTAN TIMUR	650,000	500,000	350,000	200,000
23	SULAWESI UTARA	600,000	500,000	350,000	200,000
24	GORONTALO	500,000	450,000	300,000	150,000
25	SULAWESI BARAT	500,000	400,000	300,000	150,000
26	SULAWESI SELATAN	650,000	500,000	350,000	200,000
27	SELAWESI TENGAH	500,000	400,000	300,000	150,000
28	SULAWESI TENGGARA	500,000	400,000	300,000	200,000
29	MALUKU	450,000	300,000	200,000	150,000
30	MALUKU UTARA	450,000	300,000	200,000	150,000
31	PAPUA	600,000	450,000	350,000	250,000
32	IRIAN JAYA BARAT	500,000	400,000	300,000	200,000

RINCIAN TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE JAKARTA
DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS

1. Tambahan Biaya BBM Kalianda - Jakarta PP 50 Liler x Rp. 4.500 x Rp. 225,000
2. Biaya Penyeberangan PP 2 Kali x Rp. 170.000 x Rp. 340,000
3. Biaya Tol PP 2 Kali x Rp. 30.000 x Rp. 60,000

Catatan :

1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi Lampung dan Dalam Daerah Kabupaten Lampung Selatan tidak disediakan penginapan.

2. Besarnya tambahan BBM, biaya penyeberangan PP dan biaya Tol PP selain tujuan Jakarta dengan menggunakan kendaraan dinas, disesuaikan dengan jarak tempuh yaitu : BBM 1:8 dan tarif tol sesuai dengan tarif yang berlaku

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

Nomor : 18 Tahun 2007
Tanggal : 12 September 2007

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	Jumlah :	Rp.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
Rp.

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Bendahara

Yang menerima

(.....)
NIP

(.....)
NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah
Yang telah dibayar semula
Sisa kurang / lebih

: Rp.
: Rp.
: Rp.

Pejabat Penatausahaan Keuangan / Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
NIP

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR